

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Israel sang negara teroris sekali lagi membantai muslim di Gaza, dan hal ini terjadi dipenghujung tahun 2008, yaitu dimulai pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009. Akan tetapi sebenarnya pejabat Israel telah membocorkan informasi tentang akan adanya serangan itu dimana tidak akan ada siapapun yang selamat. Bahkan pejabat Israel juga menyebutkan bahwa Israel menunggu cuaca yang baik agar bisa membantai dengan baik. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Desember 2008 ditengah hiruk pikuk kesibukan, pembantaianpun di mulai.<sup>1</sup>

Gelombang serangan pertama terjadi secara terkoordinasi dalam tempo 3 menit dengan melibatkan 60 jet F-16 menyerang 50 titik target infrastruktur Gaza yang masih tersisa. Gelombang kedua menghancurkan markas HAMAS padahal markas tersebut terletak di tengah populasi warga sipil. Dalam satu jam serangan pertama, 155 korban tewas dan jenazah korban terus berdatangan dan memenuhi rumah sakit. Dan selama 22 hari perang ini terjadi, tercatat tidak kurang dari seribu lebih warga Palestina mengalami korban jiwa dan lebih dari dua ribu korban luka lainnya dalam waktu sepekan serangan udara yang dilancarkan pasukan Israel ke Jalur Gaza. Menlu Israel Tzipi Livni membela serangan udara

---

<sup>1</sup> "Mesir mengkhianati rakyat Palestina, dalam *www.eramuslim.com*, diakses Tanggal 7 Oktober 2009.

ini dengan berkata dalam siaran TV, “Israel tidak punya pilihan. Kami melakukan apa yang kami harus lakukan untuk melindungi warga kami.”<sup>2</sup> Israel menuduh Hamas, yang memenangkan pemilu 18 bulan lalu dan didukung oleh Iran, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan roket ini. Israel memang selalu mengkambinghitamkan Hamas sebagai kelompok Islam radikal yang bertujuan menghapus Israel, padahal Israel telah memblokade Gaza sejak lama. Secara rutin, Israel menutup jalur penyeberangan perbatasan menuju Gaza, yang berakibat pada kelaparan massal. Dalam sebulan terakhir, penyeberangan menuju ke Gaza dibuka selama 5 hari saja. Perwakilan PBB untuk Gaza menggambarkan situasi yang menyedihkan sebagai berikut, “Tiap hari adalah perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Warga benar-benar kelaparan. Semua serba kekurangan, termasuk makanan yang sempat habis selama dua hari, dan fakta yang semakin memburuk yang bisa berakhir kepada kepahitan kami berusaha keras mencari alasan untuk memiliki harapan yang realistis.”

Tanggapan dunia pun sudah bisa diduga. Israel tetap menjadi anak favorit bagi Barat. PM Inggris Gordon Brown dalam wawancara dengan BBC mengatakan bahwa ia ‘sangat prihatin’ dan mengatakan bahwa milisi Palestina harus menghentikan serangan roket terhadap Israel, meskipun Palestina adalah pihak yang diserang dan Muslim dibantai.

Tanggapan Negara-negara non muslim seperti Inggris dan Amerika yang selalu membela dan membenarkan segala tindakan Israel tidaklah mengherankan karena Israel memang merupakan sekutu mereka. Yang justru mengherankan

---

<sup>2</sup> “Tragedi Gaza”, dalam <http://www.media-indonesia.com>, Diakses Tanggal 10 Oktober 2009.

adalah para penguasa muslim Arab yang notabene adalah sesama dunia Arab seperti Arab Saudi, Jordania dan Mesir seakan-akan bersikap tidak mau tahu tentang penderitaan rakyat Palestina. Padahal dinegara-negara lain banyak mengalir dukungan-dukungan terhadap Palestina. Sedangkan Mesir yang saudara dekat dan secara geografis lebih dekat dengan palestina terlihat cenderung memihak Israel dan tidak peduli terhadap jatuhnya korban muslim. Dan yang lebih parah adalah ketika warga Palestina memerlukan bantuan yang hanya bisa melewati pintu gerbang Rafah, Mesir tidak bersedia untuk membukanya. Untuk itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Invasi Israel ke Palestina Tahun 2008.”**

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Mesir cenderung berpihak kepada Israel dalam invasi Israel ke Palestina tahun 2008
2. Mengkaji dan mengidentifikasi berbagai variabel yang terkait dengan sikap dan kebijakan Mesir terhadap penyerangan Israel ke Palestina tahun 2008 yang cenderung berpihak kepada Israel.
3. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Mesir adalah Negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, yang mempunyai batas langsung antara Israel dan Palestina. Dimana terdapat didalamnya adalah pintu Rafah yang merupakan Pintu satu-satunya yang bisa digunakan untuk pergerakan rakyat Palestina di luar Jalur Gaza. Pintu ini menghubungkan antara Jalur Gaza dengan Mesir. Dan karena adanya faktor geografis ini menyebabkan mesir mau tidak mau merasakan dampak bahkan terlibat dalam setiap peristiwa yang terjadi didalamnya.

Didalam bertetangga, biasanya sebuah komunitas jika melihat rumah tetangganya mengalami musibah fisik seperti kebakaran atau ancaman pembunuhan, hal yang pertama kali yang lazim dilakukan adalah dengan menolong tetangganya agar sebisa mungkin menghindari munculnya korban jiwa, apalagi jika rumah tetangganya itu adalah saudara atau kawan dekat ataupun sesama agama. Namun kelaziman ini tampaknya kurang berlaku di Mesir. Ketika terjadi perang antara Israel dan Palestina ditahun 2008 Mesir seakan membiarkan rakyat Gaza menyerahkan nasib nyawanya kepada hujan bom Israel, satu-satunya pintu perbatasan yang menjadi urat nadi kehidupan penduduk Gaza justru fungsinya dipersempit oleh pihak penguasa Mesir hanya sebagai jalur keluar bagi segelintir penduduk Gaza yang terluka (ataupun terlanjur meninggal) dan sebagai jalur masuk bagi sedikit bantuan-bantuan logistik dan obat-obatan (hanya puluhan truk dari minimal 700 truk perhari yang dibutuhkan menurut kalkulasi aktual pemerintah setempat dan pihak PBB). Padahal hanya pintu perbatasan inilah (pintu Rafah) yang paling memungkinkan bagi penduduk Gaza untuk berharap.

Sikap Mesir ini memancing rasa heran dari berbagai pihak baik dari pihak kawan maupun lawan. Qatar, Suriah, Sudan dan Iran sebagai sesama Negara Arab dan Islam tanpa lelah selalu mendesak Mesir untuk membuka pintu Rafah untuk segala fungsi. Presiden Sudan Al Basyir dan pemimpin Libya Qaddafi dengan kesal mengatakan apa gunanya menjadi penguasa Arab jika mendiamkan penduduk Gaza menderita. Adapun dipihak lawan Bush dan Olmert tidak sanggup menahan rasa kagumnya terhadap penguasa Mesir yang "stay firm" didalam menutup pintu Rafah. Didalam tingkat akar rumput sudah pasti menimbulkan amarah besar, jutaan rakyat negeri-negeri Arab turun kejalan, berteriak, menangis meratapi keterbatasan mereka karena tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong penduduk Gaza. Bahkan rakyat Mesir menuntut lebih, mereka meminta agar pemerintahnya segera mengusir duta besar Israel dan memutus jalur pasokan gas dari Mesir ke Israel. Kedutaan-kedutaan Mesir diberbagai negara Arab terpaksa harus dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat untuk menghindari amuk massa.<sup>3</sup>

Konflik yang melibatkan dunia Arab dan Israel ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, ketika pertama kalinya terjadi perebutan wilayah yang sama-sama dijanjikan oleh Inggris. Inggris yang tak mampu lagi mengendalikan situasi dan menghentikan kerusuhan meminta bantuan dari PBB yang baru saja dibentuk (dalam periode ini Inggris mengalami kesulitan keuangan dan tak mampu lagi membiayai keberadaan tentaranya di wilayah tersebut yang mencapai 100.000 orang). Pada tanggal 15 Mei 1947 PBB membentuk sebuah komite dengan nama

---

<sup>3</sup> Kejumudan Rezim-Rezim Arab di Tengah Konflik Israel-Palestina, dalam *www.bonzara.com*, Diakses tanggal 10 Oktober 2009.

UNSCOP. Setelah lima minggu melakukan pembicaraan dan penelitian, komite merekomendasikan pembagian Palestina menjadi wilayah arab dan yahudi. "Two state solution" diterima dengan keluarnya resolusi 181 majlis umum PBB pada november 1947 dengan dukungan suara 33 dan menentang 13 serta abstain 10.

Dalam pembagian wilayah tersebut ditentukan bahwa jerusalem yang merupakan kota suci bagi tiga agama besar dunia menjadi wilayah internasional agar keamanan dan stabilitasnya bisa dijaga bersama-sama.

Pembagian wilayah yang didasarkan pada jumlah penduduk dari kedua belah pihak dan kepemilikan tanah ini ditentang oleh negara-negara arab yang tergabung dalam liga arab. Sementara di lapangan kerusuhan terus berlanjut antara kedua belah pihak.

Kelompok yahudi menerima pembagian wilayah seperti yang tertuang dalam resolusi 181 tahun 1947. Resolusi yang dikeluarkan sebagai dasar untuk berdirinya dua negara Israel dan Plestina yang merdeka ini ditolak oleh negara-negara arab. Negara-negara arab menolak berdirinya negara israel karena mereka beragama yahudi. Karena mereka bani israil. Mereka menganggap bani israil tidak berhak tinggal di sana, meskipun dalam kenyataanya jumlah populasi dan penguasaan yahudi atas tanah di wilayah itu tak bisa dipungkiri (yahudi menguasai tanah-tanah tersebut dengan membelinya dari penguasa turki dan orang-orang arab muslim palestina).

Mesir juga tidak menyetujui berdirinya negara palestina karena menginginkan wilayah barat dalam pembagian tersebut masuk sebagai wilayah Mesir (termasuk wilayah gaza saat ini). Jordania juga menolak berdirinya negara

Palestina ataupun Israel dan menginginkan wilayah sebelah timur untuk menjadi bagian dari Jordan.

Pada tanggal 14 Mei 1948, satu hari sebelum berakhirnya mandat Inggris, Israel mendeklarasikan kemerdekaan atas wilayah yang diperuntukkan bagi mereka dalam resolusi 181 dan menjadi negara Israel merdeka. Keesokan harinya liga arab melayangkan protes resmi ke PBB atas berdirinya negara Israel. Alih-alih segera melakukan konsolidasi untuk mendirikan negara palestina merdeka, tentara Mesir, Jordan, Syria dan Irak justru menginvasi wilayah yang diperuntukkan untuk negara palestina oleh UNSCOP. Invasi inilah yang memicu perang Arab-Israel 1948 karena dengan menduduki wilayah yang diperuntukkan bagi negara Palestina merdeka berarti tentara koalisi Arab telah mengepung dan mengancam eksistensi negara Israel yang baru saja berdiri.

Tapi sayang pasukan koalisi Arab ternyata kalah dalam perang tersebut. Pasukan Israel berhasil memukul mundur tentara koalisi Arab dan berhasil menguasai wilayah yang diduduki tersebut. Kemenangan Israel membuat mereka menguasai sebagian besar wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi negara palestina merdeka yang sempat diduduki oleh tentara koalisi arab. Hanya tersisa sedikit wilayah di bagian barat daya (Gaza) yang akhirnya dikuasai oleh Mesir. Adapun wilayah yang tersisa di bagian timur (Nablus, sebagian Jerusalem dan Hebron yang disebut West Bank) dikuasai oleh Jordan. Sejak mulainya konflik ini, orang Palestina tidak pernah berkuasa atas kedaulatannya sendiri.

Dalam perang tersebut sekitar 711.000 rakyat palestina meninggalkan wilayah yang berhasil dikuasai oleh Israel dan menjadi pengungsi (sebagian dari pengungsi ini meninggalkan tanahnya karena instruksi dari tentara koalisi arab, sebagian mengikuti fatwa dari grand mufti, sebagian lagi karena takut akan kerusakan yang ditimbulkan oleh tentara Israel).

Penduduk arab muslim yang tidak meninggalkan wilayah yang dikuasai Israel akhirnya menjadi warga Negara Israel hingga sekarang dan merupakan minoritas terbesar di dalam Negara yahudi tersebut dengan jumlah hampir 20 persen dari total penduduk Israel.

Perang akhirnya berakhir dengan ditandatanganinya gencatan senjata antara Israel dan Negara-negara Arab tetangganya pada tahun 1949. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati batas baru wilayah Negara Israel (green line) yang diakui secara internasional. Batas baru Negara Israel yang disepakati ini termasuk wilayah yang berhasil dikuasai Israel dalam perang 1948 (sebagian wilayah yang tadinya diperuntukkan sebagai Negara Palestina merdeka). Wilayah Israel menjadi semakin luas akibat invasi Arab ke wilayah Palestina berhasil dipukul mundur oleh Israel. Dalam gencatan senjata 1949 koalisi Arab mengakui batas baru wilayah Israel.

Perlu diketahui bahwa setelah berdirinya Negara Israel, sebagian yahudi yang tinggal di Negara-negara Arab mendapat perlakuan diskriminatif sehingga menimbulkan kerusuhan di Yaman dan Syria. Orang-orang yahudi di Libya dihapus kewarganegaraannya, beberapa yahudi di Irak dirampas hartanya. Antara tahun 1948 sampai 1952 sekitar 285.000 orang yahudi bermigrasi dari Negara-

negara arab ke Israel yang baru berdiri. Menurut catatan resmi dari negara-negara Arab, pada awal 1970-an sekitar 850.000 orang yahudi meninggalkan negara-negara arab menuju Israel. Kebanyakan dari mereka terpaksa meninggalkan kekayaannya ketika hijrah ke Israel. Keturunan yahudi dari negara-negara arab ini merupakan 41 persen penduduk Israel saat ini.

Meskipun Mesir menandatangani gencatan senjata dengan Israel, pada tahun 1956 Mesir melarang kapal-kapal Israel melintasi perairan Tiran dan memblokade teluk aqaba. Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi konstantinopel tahun 1888 dan mencederai gencatan senjata 1949 dengan Israel. Pada tanggal 26 Juli 1956 Mesir menasionalisasi terusan suez dan melarang kapal-kapal Israel melintas.

Pada tanggal 29 Oktober 1956, Israel yang merasa bahwa Mesir mencederai perjanjian 1949 dan berusaha membunuh perekonomian Israel meminta bantuan dari Inggris dan Perancis (yang sakit hati atas nasionalisasi terusan suez) untuk mengeroyok Mesir. Dalam konflik terusan suez ini Israel berhasil menduduki Gaza (yang dalam perjanjian 49 merupakan wilayah Mesir) dan Sinai.

PBB dan Amerika Serikat turun tangan untuk menghentikan konflik yang terjadi. Israel bersedia mundur dari wilayah Mesir yang baru diduduki. Mesir mengizinkan kembali kapal-kapal Israel melintasi terusan suez dan membuka blokade aqaba serta melakukan demiliterisasi di wilayah Sinai. Pasukan internasional PBB dengan nama UNEF dibentuk untuk mengawasi wilayah demiliterisasi.

Namun pada tanggal 19 Mei 1967 Mesir mengusir pasukan internasional dan menggelar 100.000 pasukan di semenanjung Sinai serta kembali melakukan blokade dan pelarangan atas kapal-kapal Israel untuk melintasi Tiran straits. Mesir mengembalikan keadaan seperti tahun 1956 ketika Israel diblokade.

Tahun 1966-1967 pemimpin Mesir Gamal Abd Nasser melakukan kampanye mencari dukungan dari pan-Arab untuk menaklukkan Israel dan mengusir Yahudi. Pada 30 Mei 1967 Jordan masuk dalam pakta pertahanan yang sebelumnya dibentuk oleh Mesir dan Syria. Dengan persenjataan modern dari Soviet, Mesir melakukan mobilisasi pasukan di Sinai dan melintasi batas demiliterisasi yang disepakati (setelah mengusir pasukan PBB) dan mendekati perbatasan selatan Israel.

Pada saat bersamaan pasukan Jordan, Syria dan Lebanon mulai mengepung Israel dari arah timur dan utara. Pada tanggal 5 Juni 1967 Israel merespon dengan mengerahkan semua kekuatan udaranya menggempur Mesir. Angkatan udara Israel berhasil melumpuhkan hampir semua kekuatan udara Mesir dalam sebuah serangan mendadak. Kekuatan udara Israel lalu menuju ke timur untuk menyerang kekuatan Syria, Jordan dan Irak.

Dalam perang yang terkenal dengan sebutan perang enam hari tersebut Israel berhasil mengalahkan negara-negara arab dan tetangganya yang mengepungnya. Ketika perang berakhir, Israel berhasil menguasai West Bank dan Jerusalem timur (yang tadinya dikuasai Jordan) serta Gaza dan Sinai (yang dikuasai Mesir) dan dataran tinggi Golan.

Pada tahun 1969 Mesir kembali memulai perang dengan tujuan melemahkan kekuatan Israel di Sinai. Namun perang ini berakhir dengan kematian Nasser.

Pada 6 Oktober 1973 Mesir dibawah pemimpin baru Anwar Sadat dan Syria melakukan serangan mendadak dan berhasil mengalahkan Israel. Mesir berhasil menguasai kembali Sinai yang sempat dicaplok Israel.

Ketika pasukan Mesir hendak masuk Israel, Israel meminta bantuan dari Amerika Serikat (meskipun sejak awal Amerika Serikat merupakan backing kekuatan Israel). Soviet yang menjadi backing kekuatan Mesir mengancam akan melakukan intervensi militer jika Amerika terlibat. Karena khawatir akan terjadinya perang nuklir, Amerika Serikat akhirnya memprakarsai gencatan senjata pada 25 Oktober 1973.

Pada bulan Maret 1979 Mesir dan Israel akhirnya melakukan perjanjian damai. Dalam perjanjian Camp David ini disebutkan bahwa Sinai kembali menjadi wilayah kekuasaan Mesir, adapun Gaza tetap berada dibawah kontrol Israel dan masuk dalam rencana masa depan Palestina. Pada bulan Oktober 1994, Jordan juga akhirnya melakukan perjanjian damai dengan Israel. Mesir dan Jordan menjadi dua Negara arab yang mengakui eksistensi Negara Israel dan memiliki hubungan diplomatik dengannya.

Tapi kelompok garis keras arab memandang perjanjian damai dengan Israel sebagai sebuah pengkhianatan dan Anwar Sadatpun akhirnya ditembak mati oleh kelompok ekstrimis tersebut.

Setelah adanya perjanjian Camp David 1979 ini, Mesir yang secara otomatis mengakui eksistensi Israel dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel ini

memang lebih cenderung bersikap pragmatis. Apalagi setelah Husni Mubarak terpilih sebagai presiden, hubungan yang terjalin antara Israel dan Mesir semakin dekat, berbedanya ketika Gamal Abdul Nasseer sebagai presiden Mesir dengan semangat Pan-Arabismenya yang sangat anti Israel.

Pada akhirnya, sepanjang konflik Israel-Palestina, negara-negara Arab, terutama Arab Saudi dan Mesir yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, bersikap ekstra hati-hati. Banyak kalangan menyebut nyali mereka terlampau ciut. Padahal banyak negara-negara Eropa yang non-muslim yang justru ikut berdemo menentang Israel. Kita tidak akan mendapati solidaritas terhadap palestina di dunia Arab. Yang kita dapatkan hanyalah kenyataan kedekatan Arab terhadap negara adidaya seperti Amerika yang selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Israel dalam aksinya terhadap Palestina.

Pengakuan dan kedekatan Mesir terhadap Israel sudah terlihat dengan jelas ketika secara pertama kali membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir adalah salah satu negara Muslim yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel lewat perjanjian Camp David tahun 1979. Dengan perjanjian damai tersebut, Mesir menjadi negara Arab pertama yang dapat melakukan pendekatan dan kontak langsung dengan Israel. Perjanjian damai tersebut juga mengantarkan Mesir pada aliansi strategis dengan AS dan Barat yang saat ini diakui sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dan ikut menentukan prospek proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam konteks perang atau invasi Israel ke Palestina pada tahun 2008, fakta keberpihakan Mesir terhadap Israel terlihat semakin jelas. Dalam surat kabar Al-

Quds Al-Arabi yang terbit di London, Inggris memuat informasi tentang peran Mesir dalam serangan Israel ke Jalur Gaza. Ibarat seorang pengkhianat, Mesir, salah satu negara yang telah berdamai dengan Zionis Israel menikam Hamas dari belakang.<sup>4</sup> Dari berbagai sumber disebutkan bahwa kepala Intelejen Mesir Omar Suleiman yang selama ini terlihat aktif menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Hamas, telah menipu Hamas dengan cara meyakinkan Hamas bahwa Israel tidak akan melakukan agresi ke Jalur Gaza dalam waktu dekat. Tapi ternyata, Israel melakukan agresi itu dengan tiba-tiba sehingga Hamas tidak sempat melakukan evakuasi di komplek-komplek keamanan dan markas-markas besarnya serta menyelamatkan sebagian besar warga Gaza.

Suleiman juga meyakinkan para pimpinan negara Arab bahwa Israel hanya akan melakukan operasi militer terbatas ke Gaza untuk menekan Hamas agar mau meneken kesepakatan gencatan senjata. Harian itu juga mengutip informasi dari mantan Menlu Palestina yang juga pejabat Hamas, Mahmoud Al-Zahar yang mengatakan bahwa satu hari sebelum Israel menggelar agresinya, tepatnya hari Jumat 26 Desember 2008 malam, Mesir masih mengatakan pada Hamas bahwa Israel siap memulai pembicaraan baru gencatan senjata dan tidak akan menyerang Gaza. Bujukan Mesir membuat Hamas tidak melakukan evakuasi seperti prosedur yang biasa dilakukan Hamas jika menghadapi ancaman-ancaman Israel.<sup>5</sup>

Hal tersebut diatas memang sangat memperlihatkan keberpihakan yang nyata karena sebelumnya memang untuk menenteramkan Jalur Gaza terdapat

---

<sup>4</sup> Membongkar pengkhianatan penguasa muslim, dalam <http://www.infopalestina.com/ms>, diakses tanggal 12 Oktober 2009.

<sup>5</sup> Ibid

rencana substantif, yaitu dengan prakarsa mengerahkan delegasi keamanan Mesir. Pasukan keamanan Mesir, seperti sebelumnya dimasa lalu yang pernah terjadi, Kairo mengutus Kepala Intelijen Omar Solaiman sebagai mediator pertemuan Presiden Yasser Arafat dengan PM Israel Yitzhak Rabin. Dan Mesir dipilih sebagai mediator karena, selain sebagai pusat atau markas Liga Arab, juga negara terbesar Arab di Timur Tengah.

Mesir, seperti Yordania, juga pernah berperang kemudian berdamai dengan Tel Aviv. Dan terbukti Pada 14 Desember 2008, Kepala Biro Diplomasi Militer Departemen Pertahanan Israel Jenderal Amos Gilad bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir Omar Sulaeman di Kairo. Bahkan pada 25 Desember, dua hari sebelum Israel mengebom Gaza, Presiden Mesir Husni Mubarak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni. Pada hari dimulainya serangan ke Gaza, Menteri Pertahanan Mesir Marsekal Hussein Muhammad Tantawi bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Laksamana Mike Mullen. Sebelumnya Mesir merupakan mediator antara faksi Fatah dan Hamas Palestina dan ketika pecahnya perang Israel tahun 2008, mesir adalah penghubung antara Hamas dan Israel untuk kemungkinan kesepakatan pencabutan blokade Jalur Gaza dan pembebasan tentara Israel yang disandera pejuang Gaza, Gilad Shalit.<sup>6</sup>

Fakta lain yang menunjukkan Mesir sebagai pendukung dari Israel adalah sikap Mesir yang menutup pintu Raffah dimana hal ini dianggap lebih cenderung membantu Israel dalam agresi tahun 2008 ini. Penutupan pintu gerbang Rafah

---

<sup>6</sup> Mesir sebagai mediator, dalam [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), diakses tanggal 03 Januari 2010

menunjukkan sebenarnya Mesir melindungi penyerangan Israel terhadap Palestina. Karena dengan ditutupnya pintu gerbang Rafah maka bantuan kemanusiaan terhambat. Padahal sebenarnya jika Mesir tidak memberikan bantuan apaun kepada Hamas, tetapi membuka perbatasan Rafah hal itu sudah cukup. Karena apabila Rafah dibuka, Iran bisa membantu, begitu juga dengan Syria dan Negara-negara lainnya. Akan tetapi kenyataanya pada awal Januari 2009 Presiden Mesir Husni Mubarak menyatakan menutup gerbang Rafah bagi pengungsi Palestina.

Pemerintah Mesir masih melarang bantuan masuk ke Gaza. Hal ini disampaikan Jurubicara UNHCR, Ron Redmond kepada wartawan di Jenewa, Swiss. Setelah sepekan perang terjadi UNHCR belum dapat mengeluarkan muslim Gaza dari perang yang sedang berkecamuk, akibat larangan pemerintah Mesir. Akibat larangan ini kondisi Muslim Gaza, semakin memburuk, karena tidak dapatnya bantuan masuk ke wilayah yang sedang dilanda agresinya rejim Zionis-Israel. Pemerintah Mesir membiarkan tragedi kemanusiaan yang dialami muslim Gaza, dan tidak ada sedikitpun belas kasihan atas kondisi mereka. Dan, yang sangat menarik, ketika Presiden Husni Mubarak bertemu dengan delegasi Uni Eropa, menyatakan : 'Hamas tidak boleh menang dalam perang melawan Israel. Gerbang Rafah hanya dibuka setelah ada persetujuan Israel. Mubarak beralasan tanggung jawab keamanan perbatasan berada di tangan Israel.'<sup>7</sup>

Padahal seharusnya sebagai sesama negara Arab, Mesir seharusnya lebih berpihak kepada Palestina (Hamas) karena mereka adalah sesama Negara muslim,

---

<sup>7</sup> Dibalik serangan Israel ke Gaza, dalam [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), diakses tanggal 12 Oktober 2009.

Negara Arab. Bahkan Mesir juga perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan diplomatik bisa dianggap melukai warga Palestina. Seharusnya ada tindakan yang lebih dari sekadar rekomendasi. Akan tetapi kedutaan Mesir menanggapi desakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel itu dengan diam. Penutupan pintu Rafah yang memberikan efek yang negative terhadap rakyat palestina menuai banyak kritikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Mesir sendiri. Pintu Rafah yang merupakan salah satu dari pintu di jalur gaza memang mempunyai peranan yang penting bagi Palestina.

Jalur Gaza adalah sebuah wilayah di Palestina yang bentuknya memanjang dan sempit. Panjang wilayah ini adalah 45 Km, dan lebarnya 5,7 Km di beberapa bagian, dan 12 Km di bagian yang lain. Sehingga kalau dijumlah, luas Jalur Gaza adalah 365 Km. Wilayah ini dihuni oleh sekitar 1,5 juta penduduk yang sebagian besarnya merupakan pengungsi yang meninggalkan tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Israel pernah mengumumkan telah meninggalkan wilayah ini secara sepihak, namun walaupun demikian, sebenarnya Israel masih menguasai sepenuhnya atas semua pintu masuk darat, air, dan udara wilayah ini. Ditambah lagi, Israel seringkali mengadakan penyerangan terhadap beberapa bagian perbatasan, terutama melalui serangan udara dan berbagai pembunuhan.

Sejak mulai pendudukan Israel tahun 1967, penduduk Jalur Gaza sudah hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Semua itu disebabkan oleh tindakan-tindakan Israel sebagai penjajah, kebijakan-kebijakan yang mematikan pembangunan, dan usaha-usaha menghalangi kemajuan dalam hidup rakyat Palestina. Di samping itu, Israel juga tak henti-hentinya melakukan tindak-tindak

kejahatan berupa perampasan tanah, penghancuran infrastruktur dalam industri, dan pengawasan melekat pada segala gerakan dari penduduk Palestina. Yang memperparah kondisi ini adalah langkanya sumber daya alam, hilangnya kesempatan untuk komunikasi dengan dunia luar, dan buruknya manajemen yang dilakukan oleh pemerintah otoritas Palestina yang mulai ada sejak tahun 1994.

Walaupun tentara Israel telah keluar dari Jalur Gaza pada 12 September 2005 dan berkuasanya Hamas pada pertengahan Juni 2007, namun tidak berarti Jalur Gaza sudah merdeka. Karena memang penduduk Jalur Gaza belum merasakan kedamaian dan ketenangan. Bahkan sebaliknya, Jalur Gaza seakan berubah menjadi sebuah penjara raksasa yang dikelilingi oleh kawat-kawat berduri dari segala arah. Penutupan Jalur Gaza dari dunia luar ini adalah politik Israel untuk bisa menghukum seluruh rakyat Palestina secara bersamaan. Sehingga dengan itu, sama sekali tidak ada yang dinamakan dengan kebebasan. Sebenarnya Jalur Gaza mempunyai 6 pintu. Satu di antaranya ditutup sama sekali. Sisanya lebih sering ditutup sepanjang tahun, sesuai dengan politik yang sedang dijalankan oleh Israel. Keenam pintu itu adalah:

1. Pintu Rafah. Pintu masuk ini adalah satu-satunya yang bisa digunakan untuk pergerakan rakyat Palestina di luar Jalur Gaza. Pintu ini menghubungkan antara Jalur Gaza dengan Mesir.

2. Pintu Minthar (Karni). Pintu ini digunakan untuk gerakan perdagangan. Terletak sebelah timur kota Gaza, tepat di perbatasan yang memisahkan Jalur Gaza dan Israel. Khusus digunakan untuk gerakan perdagangan keluar-masuk Jalur Gaza. Juga untuk mengirim sayur-sayuran ke Tepi Barat.

3. Pintu Bait Hanun (Iriz). Terletak di sebelah utara Jalur Gaza. Khusus digunakan untuk keluar masuk buruh, pedagang, bisnismen, dan tokoh-tokoh penting Negara.

4. Pintu masuk Shufa. Terletak di sebelah tenggara Khan Yunus. Menghubungkan antara Jalur Gaza dan Israel. Digunakan untuk keluar masuk buruh dan material pembangunan ke Jalur Gaza.

5. Pintu Karam Abu Salim (Kiram Shaloom). Terletak di sebelah selatan Jalur Gaza. Digunakan khusus untuk jalur impor dari Mesir melewati Israel. Juga digunakan oleh Israel untuk mengimpor secara terbatas barang-barang yang bernilai kemanusiaan.

6. Pintu Nahil Auz. Pintu ini tertutup dan tidak digunakan lagi. Bahkan sudah dialih-fungsikan menjadi pos militer. Dulunya biasa digunakan untuk keluar masuk buruh dan barang dagangan.

Penutupan pintu Rafah diduga merupakan persekongkolan Mesir dengan Israel, karena beberapa hari sebelum serangan dilakukan, Presiden Husni Mubarak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Isrel, Tzipi Livni. Pertemuan tersebut diduga sebagai upaya kesepakatan untuk menutup Rafah, yang merupakan perbatasan antara Mesir-Gaza. Upaya tersebut dilakukan oleh Israel, sehingga tokoh-tokoh kunci Hamas tidak bisa melarikan diri. Dan yang menjadi alasan lainnya adalah mengenai masalah dugaan penyelundupan senjata ke Gaza melalui torowongan yang benar-benar menjadi momok buat Israel. Usaha-usaha untuk menghentikan penyelundupan senjata itu sudah menjadi topik pembicaraan antara Israel dan AS, bahkan Menlu Israel Tzipi Livni bertemu di Washington dengan

Menlu AS, Condoleezza Rice sebelum lengser sebagai Menlu dan menandatangani perjanjian antara Israel-AS, tentang pencegahan penyelundupan senjata di Mesir. Dan hal ini memerlukan dukungan Mubarak, yang selama ini sudah memberikan dukungannya dengan setia kepada Israel. Akibatnya Mesir terus mengintensifkan usaha-usaha menghentikan penyelundupan senjata ke Gaza, melalui penutupan Rafah.<sup>8</sup>

Fakta berikutnya yang mengungkap keberpihakan Mesir terhadap Israel adalah seperti yang diberitakan oleh sebuah Koran di Mesir tentang sebuah perusahaan lokal di Mesir yang memberikan bantuan makanan bagi militer Israel lewat pelintasan Al-Aujah di tengah gempuran Zionis terhadap Gaza. Padahal perlintasan Rafah masih ditutup dan antrian bantuan kemanusiaan untuk rakyat belum bisa masuk ke wilayah Gaza. Laporan menyebutkan, sejumlah container Mesir mondar-mandir melalui perlintasan Aujah yang memisahkan Mesir dengan Israel. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan jadi, telah memasok makanan kepada perusahaan Tsael Food milik Israel yang bertugas membagikan makanan kepada serdadu Zionis. Harian ini mengecam tindakan perusahaan makanan Mesir yang bermerek Ladzat atas dukungannya terhadap militer Israel.

Perusahaan ini memasok makanan untuk para serdadu Israel, di saat semua rakyat Mesir merasakan sedih atas apa yang terjadi di Gaza. Di saat semua dai, imam masjid berdoa pada Allah untuk menolong rakyat tak berdosa yang sedang lapar di Gaza. Harian ini kemudian mengungkapkan tentang identitas dan tempat

---

<sup>8</sup> Mesir-Israel bertemu membahas keamanan, dalam *Sinar Baru Indonesia*, 5 Mei 2009.

tinggal orang-orang yang memberikan bantuan pada Zionis Israel. Harian ini juga menyertakan tempat, tanggal dan jumlah barang yang dikirimkan kepada tentara Zionis serta dihubungkan dengan jumlah syuhada dan terluka akibat serangan militer Israel. Dan pada saat yang sama Rafah masih tetap ditutup.<sup>9</sup>

Bahkan pemerintah Mesir juga mengeluarkan kebijakan melarang demo anti Israel. Kantor berita Mehr melaporkan, para pejabat Mesir mencegah aksi demo yang diupayakan oleh Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok oposisi terbesar. Pemerintah Mesir mengerahkan pasukannya di berbagai kota dan melarang segala bentuk konsentrasi warga untuk menentang Rezim Zionis Israel. Laporan lainnya menyebutkan, mantan wakil menteri luar negeri Mesir, Abdullah Al Ash'al, menyinggung skenario hitam pemeritahan Presiden Mesir, Husni Mubarak dalam bekerjasama dengan Israel untuk menggulingkan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza. Dikatakannya pula bahwa penutupan jalur penyeberangan Rafah bertentangan dengan ketentuan internasional.<sup>10</sup>

Dari fakta-fakta yang diungkapkan diatas benar-benar menunjukkan keberpihakan Mesir sebagai Negara Arab terhadap Israel. Apalagi dalam berbagai pernyataannya Mubarak menyalahkan Hamas sebagai pihak yang memicu Israel untuk melakukan invasi karena sikap Hamas yang menolak untuk berdamai dengan Israel, ditanggapi Mubarak sebagai suatu hal yang memperpanjang agresi Israel di Jalur Gaza.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mesir pasok makanan ke Israel, dalam <http://www.shiawallpapers.com>, diakses tanggal 5 September 2009.

<sup>10</sup> Mesir pro Israel, dalam <http://www.mediaumat.com>, diakses tanggal 5 September 2009.

<sup>11</sup> Mubarak bermuka dua, dalam <http://www.suaramedia.com>, diakses tanggal 12 Oktober 2009

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian yakni, “*Mengapa Mesir dalam agresi Israel terhadap Palestina pada tahun 2008 cenderung lebih berpihak kepada Israel?*”

#### **E. KERANGKA DASAR TEORI**

Teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi-proposisi atau stemen-stemen tentang, misalnya, perilaku rasional berdasar suatu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti ini dibuat untuk menggambarkan perilaku politik aktor-aktor rasional.<sup>12</sup> Misalnya Morgenthau<sup>13</sup> merumuskan suatu teori politik internasional yang, “dengan membuat gambar tentang keadaan politik yang rasional, teori bisa menunjukkan kontras antara keadaan politik yang senyatanya ada dan keadaan politik yang ingin diciptakan, tetapi tidak pernah terwujud”. Konsepsi teori seperti ini melandasi pembuatan teori deterens, game theory dan beberapa tipe teori pembuatan keputusan.

##### **1. Teori pembuatan keputusan Politik Luar Negeri**

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan menggunakan *Decision Making Theory* (Teori Pembuatan Keputusan). Khususnya *Foreign Policy decision Making*. Teori Pembuatan Keputusan

---

<sup>12</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: LP3ES, 1990), hal. 22

<sup>13</sup> W.T.R Fox (Ed.). *Theoretical Aspects of International Relations* (Univ. of Notre dame, 1959), hal 17.,dalam *ibid*

mengidentifikasi sejumlah besar variable yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variable tersebut. Teori ini mengarahkan perhatiannya secara langsung bukan kepada Negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “Eksekutif”, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu “mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan Negara. Tindakan Negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama Negara.”<sup>14</sup>

Menurut Graham T. Allison, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, berusaha untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan

---

<sup>14</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito (Yogyakarta: FISIPOL UMY, 1995). hal 373

kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.<sup>15</sup>

Sedangkan Menurut teori pembuatan keputusan William D. Coplin, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah: (1) Kondisi politik dalam negeri (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain dalam system internasional itu.<sup>16</sup>

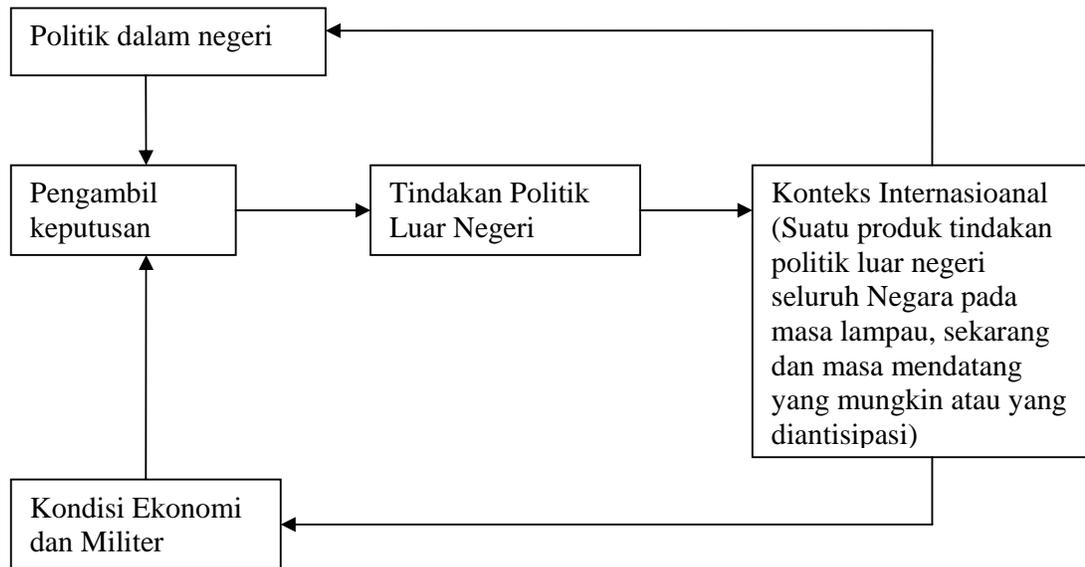
Menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri:

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi social UGM, 1988). Hal 217

<sup>16</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). hal. 30

**Gambar 1**  
**Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri**



**Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 Bandung , Sinar Baru, 1992. hal. 30**

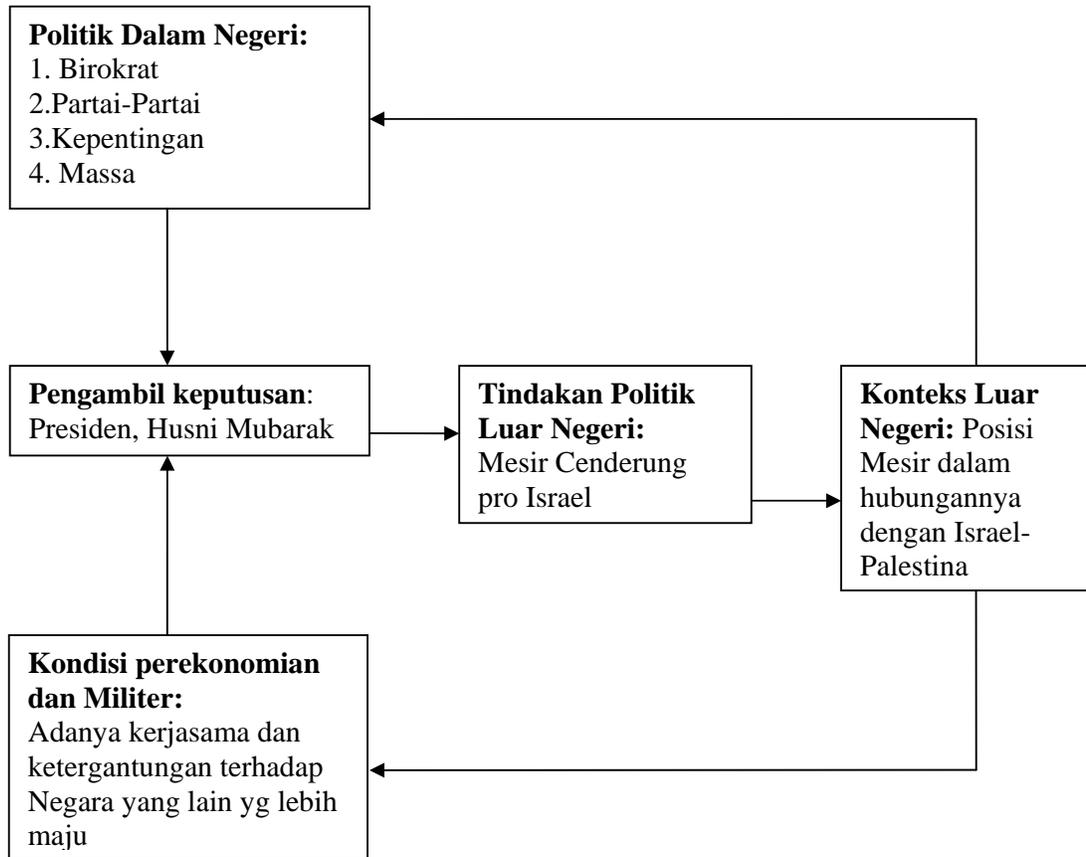
Menurut gambar diatas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini presiden sebagai pemegang tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional yang memang cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam pengambilan keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan Negara atau kepentingan pribadi dari pengambil keputusan ini. Dan dalam konteks invasi Israel ke Palestina tahun 2008 ini, maka keputusan pemerintah mesir yaitu pemerintahan Husni Mubarak yang cenderung berpihak

kepada Israel menganggap bahwa hal ini merupakan pemikiran yang rasional berdasarkan pertimbangan untung-rugi berdasarkan pertimbangan dari segi atau aspek ekonomi dan militer.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan ketiga faktor yang telah disebutkan dalam teori pengambilan keputusan William D. Coplin, akan tetapi pada bagian politik dalam negeri dan konteks internasional hanya secara garis besar dan penelitian ini akan berfokus pada kondisi ekonomi dan militer saja. Maka menurut teori William D. Coplin ini menyebutkan bahwa dalam kaitannya terhadap politik luar negeri, politik dalam negeri berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Sedangkan konteks Internasional adalah posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam system internasional itu, dimana merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin atau yang diantisipasi

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, akan penulis gambarkan aplikasi teori William D. Coplin tersebut sebagai berikut:

**Aplikasi Gambar Teori Pengambilan keputusan Luar Negeri William D. Coplin**



Fokus penelitian yang diletakkan pada **kondisi ekonomi dan militer** memang sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya politik luar negeri Mesir dalam konteks hubungannya dengan Israel ini. Dimana kepentingan ekonomi dan kemampuan militer suatu negara sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan luar negeri. Dewasa ini hanya sedikit negara yang secara potensial di anggap sebagai negara yang swasembada, yaitu negara-negara yang tampaknya memiliki kapasitas untuk memelihara standar hidup yang sama didalam negeri, tanpa bergantung pada perdagangan luar negeri. Para penstudi pembangunan ekonomi

biasanya membuat pemisahan yang tegas antara negara-negara yang secara ekonomi sudah maju, ekonominya mandek dan prospek pertumbuhannya sangat kecil, kemudian masyarakat yang ekonominya mandek tapi tidak lama lagi akan mampu membelok ke arah pembangunan ekonomi, berikutnya negara yang ekonominya sedang berkembang dimana terdapat peluang untuk pertumbuhan—tetapi masih lama, kemudian terakhir negara yang secara ekonomi sudah jelas berkembang dan pertumbuhannya sangat mungkin berkelanjutan.<sup>17</sup> Dan dalam hal ini Mesir termasuk kategori negara yang ekonominya sedang berkembang dimana terdapat peluang untuk pertumbuhan—tetapi masih lama.

Dengan cara-cara tertentu semua negara dewasa ini dipengaruhi oleh perdagangan dan financial internasional. Hubungan antara unsur-unsur ekonomi internasional sering dipandang dari segi neraca pembayaran. Dan ketika adanya kesulitan yang kronis dalam neraca pembayaran dan kurangnya modal secara umum, pembangunan negara-negara yang ekonominya belum maju ini masih tergantung pada sumber-sumber luar negeri atau investasi. Dan investasi ini bisa swasta dan bisa juga negara. Investasi luar negeri bisa berbentuk pinjaman jangka panjang yang berbunga rendah atau bantuan langsung, baik melalui lembaga-lembaga internasional maupun melalui Negara. Dan bantuan yang diberikan kepada Negara penerima ini sering dianggap membatasi kebebasan bertindak mereka dibidang ekonomi, politik atau militer.<sup>18</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar internasional, dan keputusan-keputusan politik, seperti

---

<sup>17</sup> Russet et al., *World Handbook*, hal 293-303, dalam William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). hal. 120

<sup>18</sup> Opcit, hal 122

penempatan pasukan diluar negeri atau peningkatan bantuan luar negeri, dapat membawa dampak terhadap neraca pembayaran suatu Negara.

Sedangkan dalam hal kemampuan atau kondisi militer, dalam suatu negara perlu ditetapkan dulu kriteria terpenting dalam kekuatan militer, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan perangnya. Kita mungkin bisa mempersoalkan perbedaan antara yang terlatih dengan yang diperlengkapi dengan baik, karena kita bisa menganggap suatu bangsa memperoleh peralatan yang canggih, akan memperoleh (atau sudah memperoleh) tenaga-tenaga ahli dan terlatih, yang diperlukan untuk menggunakan dan memelihara perlengkapan itu. Namun, karena Negara terbelakang mungkin mampu memperoleh perlengkapan yang canggih dari negara-negara maju, Negara-negara tersebut juga mungkin kekurangan tenaga yang cukup terampil dan terlatih, untuk menangani perlengkapan tersebut. Dan perlu ditekankan bahwa pelatihan bukan sekedar masalah keterampilan teknis dalam menangani mesin perang tapi juga masalah pengembangan kapasitas manusia untuk bertempur dengan baik, serta untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kondisi perang. Jadi, kemampuan untuk bertempur tidak selamanya bisa diukur hanya melalui jumlah pasukan atau perlengkapan karena jumlah pasukan kurang berarti jika dibandingkan dengan pelatihan dan jenis perlengkapan.<sup>19</sup>

Setelah menaksir kemampuan militer suatu negara, kita perlu mengetahui apakah sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Karena makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 124

kekuatan angkatan bersenjata, makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar, dalam menggunakan kekuatan. Karena seluruh ekonomi dunia sampai taraf tertentu berkaitan dengan perdagangan, dan karena banyak barang yang diperdagangkan itu berhubungan dengan industri pertahanan, semua negara sedikit banyak bergantung pada negara-negara lain dalam kekuatan militernya. Dan ketergantungan ini mempunyai dampak terhadap kedua negara karena biasanya pemasok memperoleh kontrol tertentu atas negara pembeli. Kebergantungan suatu negara pada pemasok perlengkapan militer dari luar negeri lebih dari sekedar pengadaan perlengkapan itu. Hal itu menyangkut pengadaan suku cadang, untuk pemeliharaan pada masa damai serta pada masa perang, termasuk penggunaan penasihat asing untuk menggunakan perlengkapan militer itu dengan tepat. Jadi, dalam beberapa hal negara-negara yang memasok perlengkapan militer bisa berpengaruh terhadap negara-negara yang menerima. Selain itu, penasihat- penasihat militer yang dikirim ke negara-negara terbelakang untuk membantu mereka dalam masalah-masalah teknik militer, sering melakukan tekanan politis umum sehingga kadang negara pemasok bisa memaksakan kepentingannya di negara penerima dan cenderung memperlakukan negara penerima sebagai wilayah kompetisi diantara mereka.<sup>20</sup>

Faktor penting dalam kondisi dimana adanya kerjasama antara negara maju vs negara terbelakang, adalah mobilitas negara maju yang memberi keuntungan strategis. Kemampuan teknologi dan militer bangsa-bangsa yang maju memungkinkan produksi massal dan penggunaan sistem logistik yang besar dan

---

<sup>20</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). hal. 126

kompleks. Jadi, negara maju memiliki mobilitas yang diperlukan untuk menghancurkan negara terbelakang secara cepat dan tuntas, sementara itu mereka relative kebal dan tahan terhadap serangan balasan. Negara maju bisa menekan negara yang kurang maju dengan ancaman menghentikan suplai senjata, mengembangkan barang pengganti, atau mencari pasaran-pasaran lain bagi produk-produk negara terbelakang; dengan menolak menepati perjanjian investasi atau secara fisik memboikot atau memblokade negara-negara terbelakang. Akan tetapi negara maju juga dapat memberikan bantuan kepada negara berkembang atau terbelakang berupa bantuan modal, stabilitas politik dalam negeri dll.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas dimana Mesir dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang tetapi lama, maka dapat di pahami bahwa motif ekonomi dan militer memang mendasari kebijakan luar negeri yang diambil oleh Mesir. Ketergantungan terhadap Negara yang lebih maju merupakan faktor penting dalam hal ini.

## **2. Konsep ikatan kesetiaan**

Konsep ikatan kesetiaan dalam politik luar Negeri ada 4 macam, yaitu:<sup>22</sup>

1. *Asobiyah* adalah kesetiaan yang lebih mementingkan ikatan keluarga, kesukuan atau aliran agamanya. Misalnya warga Syiah di bagian timur Saudi Arabia lebih setia kepada sesama penganut sekte Syiah dari pada penguasa Saudi yang beraliran Sunni.
2. *Wathaniyah*, adalah kesetiaan yang mementingkan ikatan Negara bangsa (nation-state), misalnya rejim Saudi Arabia menyerukan segenap rakyat

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 134

<sup>22</sup> Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001. hal 78

nya walaupun berbeda sekte keagamaannya, atau ikatan keluarga, namun tetap mengutamakan kesetiaan sebagai anggota negara bangsa Saudi Arabia.

3. *Qaumiyah*, adalah kesetiaan yang lebih mengutamakan ikatan Pan Arabisme yang beranggapan bahwa seluruh bangsa Arab di Timur Tengah adalah saudara. Misalnya sebagian rakyat Saudi Arabia berniat membela rakyat Irak yang sedang digempur AS

4. *Ummah*, adalah kesetiaan yang lebih mengutamakan ikatan sebagai anggota pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memandang perbedaan sekte dan ikatan Negara bangsa. Misalnya kaum Syiah di bagian Timur Saudi Arabia berniat membantu Iran yang sedang di embargo AS, padahal penguasa Saudi Arabia kurang menyukai penguasa Iran.

Berdasarkan konsep kesetiaan diatas, dalam konteks invasi Israel ke Palestina dan dalam melihat sikap dari Mesir maka dapat di simpulkan adanya krisis identitas atau krisis ikatan kesetiaan tersebut, sehingga solidaritas antar Negara Arab memang tidak ditemui lagi. Dan lebih cenderung bergeser kepada Nasionalisme fanatik yang cenderung sekuler dan membatasi diri dari jati diri asal yaitu Islam. Pada tahun 90an masih banyak propaganda "*misr awwalan!!!*" (Dahulukan Mesir!!) artinya segala sesuatu yang harus didahulukan dari lainnya adalah Negara (Mesir) walaupun itu Agama ataupun keluarga. Sebenarnya fenomena "*alguluwwu Al Watoni*" (nasionalisme yang berlebihan) berawal dari konsep nasionalisme regional (Pan Arabisme) yang diusung oleh Presiden Gamal Abdul Naser, namun lama kelamaan berevolusi

menjadi watoniyyah qutriyyah (Nasionalisme negara) setelah Republik Arab Bersatu (yaitu antara Mesir, Suriah dan belakangan Iraq) yang dipimpinnya terpecah akibat perselisihan diantara mereka sendiri, ditambah oleh kekalahan telak pasukan Nasser atas Israel tahun 1967 yang mengakibatkan hilangnya teritori-teritori Arab secara signifikan.<sup>23</sup>

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan awal bahwa sikap Mesir yang cenderung berpihak kepada Israel dalam invasi Israel ke palestina tahun 2008 disebabkan oleh :

1. Pencapaian target ekonomi Mesir untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik dimana Mesir mempunyai ketergantungan terhadap Israel dan Amerika.
2. Ketergantungan Militer Mesir terhadap Israel dan Amerika serta pertimbangan keamanan negara Mesir dari perang yang mungkin terjadi apabila tidak berpihak kepada Israel.
3. Lunturnya ikatan kesetiaan atau solidaritas Mesir terhadap dunia arab umumnya dan Palestina khususnya.

---

<sup>23</sup> Ada apa dengan Mesir, dalam [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com), diakses tanggal 20 Oktober 2009

## **G. JANGKAUAN PENULISAN**

Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas, secara umum penulis membatasi penelitian pada politik luar negeri Mesir dari tahun 1981 sampai dengan sikap Mesir terhadap agresi Israel ke Palestina Tahun 2008, yaitu 27 Desember 2008 – 18 Januari 2009. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menengok dan menuliskan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terkait dengan masalah ini meskipun diluar masa agresi Israel ke Palestina tahun 2008 tersebut yang dapat mendukung penelitian atau penulisan skripsi ini.

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskripsi kualitatif, artinya analisa hanya sebatas deskripsi atas fakta-fakta maupun data yang berkaitan dengan permasalahan, dengan menghubungkan tentang fakta sebab-akibat. Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, diktat, majalah, artikel, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan seperti data-data yang diperoleh dari internet.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang sistem pemerintahan Mesir dimana akan menggambarkan sistem pemerintahan dan dinamika perjalanan politik luar negeri Mesir. Bab ini juga akan dibahas hal-hal yang akan berkaitan dengan relevansinya sebagai faktor penentu kebijakan luar negeri Mesir

BAB III akan membahas tentang keberpihakan Mesir terhadap Israel, serta kronologi invasi Israel ke Palestina tahun 2008 dengan menyertakan gambaran umum awal perjalanan konflik tersebut.

BAB IV akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan keberpihakan Mesir terhadap Israel dalam menyikapi penyerangan Israel ke Palestina tahun 2008 berdasarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making*) dan teori ikatan kesetiaan.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat penulis dari bab-bab sebelumnya.